

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL PADA IPM DENGAN VARIABEL PEMODERASI DANA ALOKASI UMUM

Putu Milan Pradnyantari¹
A.A.N.B. Dwirandra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: milanpradnyantari@gmail.com/tlp. 081236078121

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

PAD dan Belanja Modal diduga tidak selalu berpengaruh linier pada Indeks Pembangunan Manusia, dikarenakan adanya beberapa faktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan tersebut, faktor kontinjensi tersebut adalah Dana Alokasi Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan Belanja Modal pada IPM, serta pengaruh PAD dan Belanja Modal dengan pemoderasi DAU pada IPM. Penelitian mencakup 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu amatan 2010-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: uji asumsi klasik, *Moderated Regression Analysis*, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan variabel Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Belanja Modal menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dana Alokasi Umum memperkuat pengaruh PAD terhadap IPM namun dapat memperlemah pengaruh Belanja Modal pada IPM.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

PAD and Capital Expenditure allegedly not always a linear effect on Human Development Index, due to contingent factors that affect this relationship, the factor is General Allocation Fund. This study aims to determine the effect of PAD and Capital Expenditure on HDI, as well as the effect of PAD and Capital Expenditure by moderating DAU on IPM. The study covers eight counties and one city in Bali Province of observations from 2010 to 2015. This study uses secondary data obtained from the Bali Provincial Finance Bureau and the Central Bureau of Statistics. Data analysis techniques used Moderated Regression Analysis. The test results indicate that the PAD can improve the Human Development Index variable Capex while lowering the level of Human Development Index in the District/City of Bali Province. General Allocation Fund strengthen the influence of PAD to the HDI but can weaken the influence of Capital Expenditure in the HDI.

Keywords: Locally-generated revenue, Capital expenditure, General Allocation Fund, Human Development Index

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan ujung tombak dalam perencanaan pembangunan. Karena tujuan dari pembangunan adalah pembangunan manusia, dalam proses pembangunan diperlukan adanya alokasi belanja untuk keperluan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran (Christy, 2009). Perbaikan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pembangunan manusia, dan dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990 tingkat kualitas hidup manusia (indeks HDI) berkembang di seluruh dunia diteliti dan diterbitkan dalam buku laporan UNDP tentang pembangunan manusia (Human Development Report/HDR). UNDP menginformasikan laporan tahunan pada tahun 2013 nilai IPM Indonesia membaik pada peringkat 108/187 negara, dari peringkat 121/187 negara pada tahun 2012. IPM Indonesia masih berada di bawah Negara-negara Regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) maka, penelitian yang sama masih perlu dilakukan. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih berada dibawah Malaysia yang berada pada ranking 62, Singapura rangking 9, Thailand pada rangking 89, dan Brunei Darussalam pada peringkat 30. Bila dibandingkan dengan IPM Myanmar IPM Indonesia lebih baik. IPM Myanmar berada pada ranking 150, Filiphina 117, Kamboja 136, dan Timor Leste pada posisi 128. Untuk membenahi

kualitas manusia Indonesia diperlukannya usaha yang maksimal untuk memperbaikinya di tengah persaingan dengan masyarakat internasional. Upaya meningkatkan IPM Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari usaha simultan untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Dalam penelitian ini di gunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu daerah.

Diketahui bahwa IPM tertinggi diperoleh Kota Denpasar yaitu sebesar 82,24 pada tahun 2015, sedangkan IPM terendah diperoleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 60,58 pada tahun 2010. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori capaian IPM yaitu IPM tinggi dengan kisaran 70-80 dan IPM sedang dengan kisaran 60-70. Setelah di rata-ratakan selama lima tahun terakhir diperoleh bahwa Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar dan Kota Denpasar mendapatkan nilai IPM dengan kategori tinggi sedangkan Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Klungkung dan Karangasem memperoleh nilai IPM dengan kategori sedang. Rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya dalam kurun waktu 2010-2015, Kota Denpasar dengan capaian IPM tertinggi sudah melebihi angka 80 hal tersebut dapat diklasifikasikan sangat tinggi, tetapi masih terdapat 5 (lima) kabupaten hampir setiap tahun nilai IPMnya berada di bawah IPM Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Klungkung dan Karangasem hal ini mengindikasikan bahwa penelitian terkait IPM khususnya di Provinsi Bali, sangat penting untuk di kaji kembali.

Hal ini mencerminkan penerimaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Bali kurang maksimal difungsikan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik serta dimanfaatkan untuk anggaran yang produktif dan dapat dirasakan oleh masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga IPM dapat meningkat. Untuk meningkatkan IPM pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan pendapatan daerahnya untuk belanja daerah pada sektor – sektor yang dapat menaikkan IPM.

Teori federalisme fiskal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya (Sumardjoko dan Irwanto, 2015). Beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain yang digunakan penulis sebagai variabel adalah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain yang digunakan penulis sebagai variabel adalah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan anggaran belanja modal daerah namun yang terjadi malah sebaliknya, peningkatan PAD tidak diiringi dengan meningkatnya anggaran belanja modal. Hal ini disebabkan karena pendapatan tersebut lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja pegawai dan keseharian pemerintahan daerah. Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Setyowati dan Suparwati, 2012). Tingkat dari kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan (Yovita, 2011). Sejalan dengan pendapat tersebut (Felix, 2012) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Dilaksanakannya desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor terutama di sektor publik. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan pembangunan berupa infrastruktur di sektor publik demi meningkatkan pembangunan fasilitas publik dan penunjang lainnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Salah satu aspek penting untuk proses pembangunan daerah yaitu infrastruktur daerah. Modebe *et al.* (2012) menjelaskan bahwa dengan adanya infrastruktur yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas. Meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatkan aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Sumber-sumber pendanaan lain selain PAD menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah dana perimbangan. Dana perimbangan salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2014:63). Pemberian DAU kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekitar 70% dari total pendapatan ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya jika hanya mengandalkan dari PAD. Hal ini menggambarkan apa saja yang perlu di beli oleh pemerintah tergantung dari besar kecilnya dana yang dimiliki pemerintah. Dana Transfer berupa Dana Perimbangan meliputi DAU, DAK dan DBH serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan, namun hasilnya tidak konsisten. Terjadinya perbedaan hasil penelitian sebelumnya meingindikasikan adanya pengaruh variabel moderating dalam mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh dari variabel moderating tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Digunakannya variabel moderating ini yaitu untuk menyelesaikan perbedaan dari penelitian tersebut, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi (Yukl, 2010:277). Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara PAD dan Belanja Modal dengan IPM. Dalam penelitian ini di gunakannya teori kontinjensi adalah untuk menganalisis variabel moderating yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara PAD, dan Belanja Modal dengan IPM.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2) apakah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (3) apakah Dana Alokasi Umum mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal

pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (3) Untuk mengetahui kemampuan Dana Alokasi Umum memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi pihak terkait, yaitu untuk manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Teori yang akan dikonfirmasi dalam penelitian ini adalah eksistensi teori federalisme fiskal, keagenan, dan kontijensi di dalam sektor publik. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Sedangkan manfaat praktis dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat atau nasional kepada pemerintah daerah atau lokal dan kewenangan daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sesuai dengan keputusannya sebagai daerah otonom, sehingga otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi (Yusuf, 2014). Dengan adanya desentralisasi diharapkan pembangunan lebih berhasil sehingga salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat (Devas dan Grant, 2003) dan (Martinez-Vazquez dan McNab, 2003). Desentralisasi fiskal menuntut tiap-tiap daerah mempunyai kemandirian keuangan

yang tinggi dengan mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Antara prinsipal dan agen sering terjadi masalah keagenan karena adanya konflik kepentingan yang dimiliki oleh principal dan agen (Halim dan Abdullah, 2006). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota sering mempraktikkan *agency theory* dalam penyusunan rancangan APBD (Adiwiyana, 2011).

Teori kontinjensi merupakan teori yang membahas berbagai aspek kepemimpinan diterapkan pada situasi tertentu saja tidak untuk situasi lain. Teori kontinjensi ada deskriptif atau preskriptif. Terjadinya kontradiksi atau perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya memungkinkan adanya pengaruh variabel moderating dalam mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Yukl, 2010:277). Pengaruh dari variabel moderating tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Variabel moderating ini digunakan untuk menyelesaikan perbedaan dari penelitian tersebut, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Mardiasmo 2009:67). Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Setyowati dan (Suparwati 2012) mengatakan bahwa DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketerampilan serta mempunyai pendapatan untuk hidup layak (Ardiansyah dkk, 2014). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), indeks harapan hidup, dan indeks standar hidup layak (Adediran, 2011).

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai segala belanja daerah. PAD berasal dari pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak di daerah tersebut, retribusi daerah, BUMD, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan Desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 34 tahun 2000). Tingkat dari suatu kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerahnya. PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang

mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Setyowati dan Suparwati 2012), dan (Lugastoro 2013) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan yaitu:

H₁: PAD berpengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali

Diterimanya penerimaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya daerah seperti PAD dan juga bantuan dari pemerintah pusat yang berupa DAU dan DAK, maka alokasi dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya juga akan semakin baik. Belanja modal dilakukan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya peningkatan sarana dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Peningkatan sarana dan prasarana publik serta investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya akan meningkatkan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan (Ndakularak, 2014). Belanja modal memiliki peran yang penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan kata lain belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Sari, 2016) yang menemukan hasil Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan yaitu:

H₂: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali.

Pembangunan suatu daerah yang dilakukan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan (Yusuf, 2014). Hal ini menuntut setiap daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah. Terkait dengan peningkatan penerimaan daerah seperti PAD dapat dikatakan bahwa tidak serta merta mampu meningkatkan IPM. Hal ini dikarenakan ada faktor kontinjensi, salah satu diantaranya adalah DAU. DAU diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh PAD dan Belanja Modal pada IPM. DAU merupakan dana perimbangan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal pada setiap daerah, dengan adanya DAU pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut yang di ukur dengan menggunakan IPM. Sebaliknya jika penggunaan DAU oleh pemerintah daerah tidak tepat sasaran maka akan menghambat proses pembangunan daerah tersebut yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat yang berdampak kepada penurunan IPM di daerah tersebut. Berdasarkan Pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan yaitu:

H₃: DAU memoderasi pengaruh PAD pada IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Diterimanya penerimaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya daerah seperti PAD dan juga bantuan dari pemerintah pusat yang berupa DAU, maka alokasi dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya juga akan

semakin baik. Belanja modal memiliki peran yang penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dikarenakan dengan adanya belanja modal maka pemerintah daerah dapat membangun dan membenahi infrastruktur. Belanja modal merupakan sarana pemda untuk membangun infrastruktur di daerah yang dimungkinkan oleh Undang-Undang melalui APBD. Namun terkadang, alokasi belanja modal sangat kecil, menurut (Yovita, 2011) menyebutkan jika proporsi belanja modal di beberapa daerah di Indonesia tidak lebih dari 20% dari total belanja daerah. Hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak mampu mendapatkan PAD yang tinggi. Maka dengan adanya DAU, diharapkan pemda memiliki tambahan dana yang cukup besar untuk di alokasikan ke Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang terkait langsung dengan peningkatan IPM seperti: sekolah, pasar, rumah sakit dll. Berdasarkan Pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan yaitu:

H₄: DAU memoderasi pengaruh BM pada IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Teknik ini digunakan untuk melihat pengaruh PAD dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia dengan DAU sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan

asli daerah, belanja modal, indeks pembangunan manusia dan dana alokasi umum di Provinsi Bali pada tahun 2010-2015.

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh variabel independen pada variabel dependen (Sugiyono, 2014:60). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum.

Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung atau data kuantitatif merupakan data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014:14). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka yang terdapat pada laporan realisasi APBD tahun 2010-2015 dan tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2010-2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain maupun melalui dokumen. Data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Biro Keuangan Provinsi Bali seperti Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2015 dan Tabel Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) tahun 2010-2015 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan realisasi APBD dan data Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2010-2015. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling jenuh*. Teknik *sampling jenuh* adalah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan. Data yang dikumpulkan melalui observasi non partisipan dengan cara melakukan pengamatan atas dokumen-dokumen atau catatan yang dihasilkan oleh pihak lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data dari dokumen yang terdapat di Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. MRA merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Liana, 2009). Persamaan *Moderated Regression Analysis (MRA)* sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 DAU + \beta_4 PAD.DAU + \beta_5 BM.DAU + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Indeks Pembangunan Manusia
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- BM : Belanja Modal
- DAU : Dana Alokasi Umum
- PAD.DAU : Interaksi antara variabel PAD dengan variabel DAU
- BM.DAU : Interaksi antara variabel BM dengan variabel DAU
- e : Nilai residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal. Untuk dapat melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal dapat dilihat dengan menggunakan uji non parametrik satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Model	N	Asymp.sig (2-tailed)
Persamaan Regresi 1	54	0,155

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa unstandardized residu memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) diatas 0,05. Berarti seluruh data berdistribusi normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjustud R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,812a	0,659	0,646	3,35207	
2	0,862b	0,744	0,717	2,99718	2,516

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil pada Tabel 2, nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 2,516. Nilai dU untuk jumlah sampel 54 dengan dua variabel bebas adalah 1,721 dan nilai dL 1,378. Persamaan dikatakan bebas autokorelasi ketika nilai Durbin Watson berada diantara $dU < DW < 4-dL$. Oleh karena nilai dU 1,721 dan nilai 4-dL adalah sebesar 2,622 maka dapat dikatakan persamaan regresi moderasi penelitian bebas gejala autokorelasi ($1,721 < 2,516 < 2,622$).

Tabel 3.
Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Variabel	Tolerance	VIF	Ket
Regresi 1	PAD	0,332	3,012	Bebas Multikoleniaritas
	BM	0,332	3,010	Bebas Multikoleniaritas
	DAU	0,997	1,003	Bebas Multikoleniaritas

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Regresi 1	PAD	0,178	Bebas Heterokedastisitas
	BM	0,094	Bebas Heterokedastisitas
	DAU	0,471	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel di atas $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dari penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas.

Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5.
Hasil Statistik Deskriptif

No	Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
1	PAD (X_1)	54	15.252,95	2.722.625,56	391.894,99	618.859,37
2	Belanja Modal (X_2)	54	42.555,10	989.405,91	180.998,96	196.832,99
3	DAU (XM)	54	86.511,96	854.532,25	470.204,34	158.907,09
4	IPM (Y)	54	60,58	82,24	70,64	5,63

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah pengamatan (N) berjumlah 54. Variabel PAD memiliki nilai terendah sebesar 16.252,95 dan nilai tertinggi sebesar 272.2625,56 dengan nilai rata-rata sebesar 391.894,99. Standar deviasi untuk PAD sebesar 618.859,37. Artinya terjadi penyimpangan nilai PAD yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 618.859,37. Variabel Belanja Modal memiliki nilai terendah sebesar 42.555,10 dan nilai tertinggi sebesar 989.405,91 dengan nilai rata-rata sebesar 180.998,96. Standar deviasi untuk Belanja Modal sebesar 196.832,99.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel DAU memiliki nilai terendah sebesar 86.511,96 dan nilai tertinggi sebesar 854.532,25 dengan nilai rata-rata sebesar 470.204,34. Standar deviasi untuk DAU sebesar 158.907,09. Artinya terjadi penyimpangan nilai DAU yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 158.907,09. Variabel IPM memiliki nilai terendah sebesar 60,58 dan nilai tertinggi sebesar 82,24 dengan nilai rata-rata sebesar 70,64. Standar deviasi untuk IPM sebesar 5,63.

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa sig.F = 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat

analisis untuk menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen.

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41,307	8,366		0,000	-
PAD (X1)	11,148	1,516	1,043	0,000	Diterima
Belanja Modal(X2)	-5,963	2,361	-0,307	0,035	
2 (Constant)	1121,137	363,616		0,003	Ditolak
PAD (X1)	-98,574	42,291	-9,224	0,024	
Belanja Modal	-96,330	82,787	-5,194	0,250	
DAU (XM)	-193,936	65,208	-6,287	0,005	
PAD.DAU	19,987	7,631	10,776	0,012	Diterima
Belanja Modal.DAU	16,013	14,814	5,405	0,285	Ditolak
Sig. F Hitung	: 0,000				
Adjusted R Square	: 0,646 & 0,717				

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* pada model sebesar 0,646 atau 64,6 persen, ini artinya sebesar 64,6 persen variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu PAD, Belanja Modal, dan DAU. Sedangkan, sisanya 35,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Persamaan kedua menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,717 yang memiliki arti bahwa 71,7% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel independen PAD, Belanja Modal, DAU dan pemoderasi. Sedangkan sisanya 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan variabel PAD sebesar 0,000 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih rendah dari $\alpha = 0,05$

dan nilai koefisien regresi sebesar 11,148. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh pada IPM dan arah pengaruhnya positif, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Ketika PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan meningkat. Hal ini dikarenakan, dengan semakin meningkatnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah memungkinkan daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan publik, menjalankan aktivitas pemerintahan menjadi semakin baik serta membiayai pembangunan daerahnya yang akhirnya berimbas pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. (Setyowati dan Suparwati 2012). Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri dimana tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel Belanja Modal sebesar 0,035 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,018 lebih rendah dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -5,963. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal berpengaruh pada IPM dan arah pengaruhnya negatif, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan kurangnya studi kelayakan dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan belanja modal pemerintah mengalami mangkrak bahkan gagal, adanya belanja modal yang dilakukan pemerintah saat ini tetapi manfaatnya dirasakan beberapa tahun kemudian (manfaat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tidak langsung dirasakan), adanya belanja modal yang sudah terealisasi namun pengelolaannya kurang maksimal, serta kecilnya porsi belanja modal jika dibandingkan dengan yang lain. Kegagalan Belanja Modal mempengaruhi IPM ini terjadi, disamping karena masih rendahnya belanja modal yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dikarenakan pengalokasian Belanja Modal belum dilakukan secara tepat sasaran (Vegirawati, 2012). Kegagalan ini kemungkinan terjadi karena adanya belanja modal yang terhenti di tengah jalan pengadaanya dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat (mubasir). Contohnya seperti mangkraknya pelabuhan Gunaksa di kabupaten Klungkung.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel interaksi PAD dan DAU sebesar 0,012 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,006 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 19,987. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan pada IPM, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Ketika PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan meningkat. Dengan adanya tambahan dana transfer berupa DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih untuk peningkatan pembangunan dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik seperti, perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum, sehingga Provinsi Bali dapat dikatakan berhasil mengelola sumber pendapatan daerah berupa

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk membiaya pembangunan sehingga dapat menaikkan tingkat IPM di Provinsi Bali.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai signifikansi untuk uji t dua sisi untuk variabel interaksi Belanja Modal dan DAU sebesar 0,285 maka tingkat signifikan t pada uji satu sisi adalah 0,143 lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 16,013. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi Belanja Modal dan DAU tidak berpengaruh signifikan pada IPM, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Diterimanya DAU oleh pemerintah daerah berarti daerah memiliki dana tambahan yang dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur tetapi tidak cukup besar. Hal ini dikarenakan dalam formulasi DAU, komponen alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS) sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM, karena sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai bukan dialokasikan untuk belanja modal ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan pasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Semakin meningkatnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah memungkinkan daerah untuk

memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, membiayai pembangunan daerahnya yang akhirnya berimbas pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya studi kelayakan dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan belanja modal pemerintah mengalami mangkrak, adanya belanja modal yang dilakukan pemerintah saat ini tetapi manfaatnya dirasakan beberapa tahun kemudian (manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak langsung dirasakan. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa ketika PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut yang diukur melalui IPM akan meningkat. Dengan adanya tambahan dana transfer berupa DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki sumber dana yang lebih untuk peningkatan pembangunan dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan bagi Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih mampu lagi menggali dan mengembangkan potensi-potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dan tidak selalu tergantung

terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan didaerahnya sesuai dengan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas agar pembangunan yang dibuat oleh pemerintrah daerah tidak terkesan mubasir. Pemerintah daerah sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik agar tidak makraknya proyek tersebut di tengah jalan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik yang dibangun selama ini dengan baik, agar kualitas fasilitas dan pelayanan publik tetap bagus. Pemerintah juga harus memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, agar tujuan dari dibangunnya fasilitas publik tersebut dapat tercapai.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mencari data yang terbaru yaitu tahun 2016. Penelitian ini dapat dilakukan kembali, namun dengan wilayah yang berbeda agar hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian daerah lain. Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan penggunaan variabel belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang masih mencakup lingkup yang luas. Pertimbangan penggunaan variabel selanjutnya adalah belanja infrastruktur yang lebih spesifik mengenai pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan fisik.

REFERENSI

- Adediran, Olanrewaju Adewole. 2011. An Assessment of Human Development Index and Poverty Parameters in the Millennium Development Goals: Evidence from Nigeria. *Crescent University*.
- Ardiansyah, dkk. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah".
- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anand, Sudhir & Amartya Sen. 2000. The Income Component of the Human Development Index. *Journal of Human Development*, 1 (1).
- Ardhini. 2011. Pengaruh rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aristovnik, A. 2012. Fiscal Decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective. MPRA Paper No. 39316, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. MRG@UQ *Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS Surabaya*.
- Devas, N and U. Grant. 2003. Local Government Decision-Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*.
- Ebit, Julitawati, Darwanis dan Jalaludin, 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 15 (1), pp: 1-18.

- Felix, Olurankinse. 2012. "Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*", 4(1), pp: 1-6.
- Gunantara, Putu Candra. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3), pp: 529-546.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* ,2(1) pp: 53-64.
- Jensen, M.C and Meckling, W.H. 1976 theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), PP: 305-360
- Keefer, Philip dan Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah, Menuju Pembangunan Baru Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Liana, Lie. 2009. Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 14(2), hh: 90-97.
- Lugastoro, Decta Pitron. (2013). Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Keempat. Yogyakarta : Andi.
- Martinez-Vazquez, J. & R.M. McNab (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, 31(9), pp:1597-1616
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*.
- Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. *Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth*. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.

- Ndakularak, Erwin. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali." *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali*.
- Penthury, M.A. 2011. Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 3(3), pp: 289-297.
- Ranis, Gustav, Frances Stewart, & Emma Samman. 2005. Human Development: Beyond the Human Development Index. *Journal of Human Development Index*, 7 (3), pp: 1-34.
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Prestasi*. Juni 2012. 9 (1), pp: 1441-1497.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjoko, Imam dan Andry Irwanto. 2015. Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan terhadap peningkatan Belanja Modal Daerah untuk menciptakan Quality Spending. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XVIII IAI-KPd. Universitas Sumatera Utara: Medan 16 – 19 September.
- Syahril. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Tiebout, Charles M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), pp: 416-424.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Vegirawati, Titin. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* Vol. 2 No. 1, Januari 2012 hal: 65-74.
- Worlu, Christian N., and Emeka Nkoro. 2012. Tax Revenue and Economic Development in Nigeria : N Macroeconometric Approach. *Academic journal of Interdisciplinary studies*, 1 (2), pp: 211-223.
- Yukl, Gary. 2010. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi kelima. Jakarta: PT. Indeks
- Yusuf, Ahmad. 2014. Pengaruh Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perkembangan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.